

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Kehidupan sosial dalam masyarakat terkadang tidak bisa dipandang secara reduksionis, hal ini terbukti ketika seorang manusia hidup dalam wilayah publik. Sementara disisi lain manusia sebagai makhluk sosial yang juga mempunyai wilayah privat yang manusia lain tidak harus mengetahuinya. Namun sebagai seorang manusia harus lah memahami bahwa dalam kehidupan sosial ini, yang pada hakikatnya manusia sebagai seorang subjek harapannya dapat hidup secara dinamis. Dalam hal ini mencakup bagaimana manusia tersebut terus berkreasi, berinovasi, berefleksi, serta berdialektika tentunya dalam hidup yang di jalannya.

Begitupun dalam dunia akademik sering sekali kita dapatkan beberapa kecenderungan dan ketertarikan seorang mahasiswa ketika menempuh studinya di Perguruan Tinggi. Kecenderungan ini sangat plural dan cukup sulit untuk diakomodir dalam kurikulum yang telah dirumuskan sebagai mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswanya. Berkenaan dalam hal ini tentunya dalam kajian ilmu sosial dimana pemahaman tentang masyarakat tidak akan pernah menemukan kata selesai dalam memahami kehidupan sosial.

Berkenaan dengan persoalan di atas, bahwa fenomena politik internasional yang selama ini terjadi sangat bersifat dinamis. Hal itu dibuktikan dengan adanya perkembangan politik yang paling tidak mengalami perubahan yang sangat signifikan. oleh sebab itulah dalam tulisan ini mencoba untuk membuktikan

seberapa jauh peran masyarakat dalam perubahan sosial di suatu negara. Sebagai seorang mahasiswa yang tidak pernah lepas dari stigma calon intelektual yang harapannya memiliki kepekaan sosial. Tentunya mahasiswa tersebut harus memilih sebuah pilihan dari sekian banyak pilihan dalam menghayati lingkungan sosialnya.

Namun hal itu kemudian harapannya bukan menjadi sebuah alasan bahwa seorang mahasiswa hanya memahami dunia yang dibangun dalam fakultasnya sendiri. Berangkat dari hal tersebut maka penulis berniat menuliskan skripsi yang lebih bersifat reflektif untuk mencoba memahami kembali persoalan masyarakat saat ini, khususnya kajian Hubungan Internasional.

Di akhir abad ke XX, dunia menyaksikan perubahan politik yang luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya. Pada abad ke XX inilah dibanyak bagian Negara-negara di dunia, para penguasa mulai menyatakan diri bahwa mereka memerintah berdasarkan "*kehendak rakyat*". Bahkan yang lebih dramatis sistem monarki seringkali ikut andil dalam mengklaim hal serupa, "*atas nama rakyat dan Tuhan*". Sejumlah Negara-negara besar telah memilih badan-badan yang terbentuk atas representasi dari sebuah pemilu dengan kekuasaan baru. Sementara itu di beberapa Negara lainnya pemerintah yang terbentuk dari sebuah pemilu berbagi kekuasaan dengan kelompok bangsawan. Banyak Negara-negara saat itu bahkan sudah menyepakati pengertian demokrasi sebagaimana yang kita tahu saat ini.

Terkait dengan persoalan diatas ada sebuah hal yang menarik ketika ditengah pergolakan situasi politik yang cepat sekali berubah, ada sebuah kekuatan yang

lahir dari dalam masyarakat. Kekuatan inilah yang mengintegrasikan menjadi sebuah kekuatan otonom dan berdiri sebagai kekuatan pengimbang Negara. Esensi dari kekuatan ini bukanlah untuk mengubah sistem disuatu Negara, melainkan untuk mendemokratisasikan sistem yang ada pada suatu Negara. Kekuatan inilah yang akhirnya membentuk sebuah gerakan-gerakan, komunitas-komunitas ataupun oraganisasi-oraganisasi yang otonom dalam geraknya, dalam perkembangannya kekuatan yang tumbuh dalam masyarakat inilah lalu disebut "*civil society.*"

Hal inilah yang belum lama terjadi di salah satu Negara miskin dipunggung pegunungan Himalaya, yaitu Nepal. Yang dalam pemerintahannya dipimpin oleh raja yang bernama Gyanendra. Namun pada akhirnya kepemimpinannya dianggap sangat otokratis dan mengancam proses demokrasi di negeri tersebut. Rupanya ada suatu pepatah lama yang sangat menyentuh yang akhirnya dipredikatkan untuk raja Gyanendra yaitu "*raja bijak, raja disembah, raja lalim, raja disanggah.*" Nepal sendiri adalah sebuah Negara yang sudah lama mempertahankan tradisi aksestis dan Mediatif Hindu, dan yang paling penting adalah Negara ini termasuk salah satu Negara yang notabene kerajaan Hindu yang yang masih tersisa di belahan dunia. Walaupun Negara ini masih mempertahankan sistem pemerintahan monarki, ternyata Nepal sendiri sudah menjalankan proses demokrasi sejak tahun 1990, hal itu dibuktikan dengan adanya penyelenggaraan pemilu multipartai.

Lalu kemudian, mengapa Nepal menjadi sebuah studi kasus yang menarik untuk ditelusuri? Sebenarnya alasannya adalah dari proses transisi demokrasi

yang terjadi di Nepal, muncul sebuah kekuatan baru yang lahir dari kegelisahan masyarakat untuk segera menyelesaikan persoalan yang terjadi di negeri tersebut. Kekuatan itulah yang akhirnya menjadi sebuah motor penggerak perubahan, walaupun kekuatan itu lahir sebagai realitas baru dalam kehidupan politik Nepal, namun tidak bisa dipungkiri bahwa kekuatan yang semula dianggap kecil ternyata dapat memobilisasi diri menjadi sebuah kekuatan yang besar, yang siap menandingi serta melawan kekuatan yang selama ini menghinggapi Nepal secara kronis.

Hal yang demikian inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengangkatnya menjadi sebuah karya tulis atau skripsi. Dalam hal ini penulis mencoba mengangkat sebuah persoalan yang lahir dari sebuah fenomena sosial yang terjadi di Nepal, yang tentunya sangat berpengaruh terhadap kehidupan politik disaat kondisi global dewasa ini. Penulis akan mencoba mengkaji persoalan tersebut dalam sebuah tema umum: *Menguatnya Gerakan Civil Society Dalam Transisi Demokrasi di Nepal Pada Tahun 2005*. Penulis mencoba untuk menggali atau sekurang-kurangnya mencari kerangka konsep yang berhubungan dengan civil society dan demokrasi yang sebenarnya sangat luas dan rumit. Tentunya akan banyak kekurangan karena ketidakmungkinan untuk menulis sebuah deskripsi yang menyeluruh dalam skripsi yang singkat ini.

B. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan menguatnya gerakan civil society sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap legitimasi demokrasi di Nepal, dengan studi kasus dibalik kejatuhan raja Gyanendra.
2. Penelitian ini bertujuan pula untuk mencoba membuktikan keakuratan konsep civil society.
3. Secara tidak langsung penelitian ini juga ingin membuktikan bahwa kehidupan sosial tidak dapat dipahami secara sederhana dan reduksionis melainkan harus dipahami sebagai sebuah kondisi yang kompleks, ambigu, dan kontradiktif.
4. Sebagai uji materi seorang mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya.

C. Latar Belakang Masalah

Dalam diskursus kontemporer, dimana hampir semua komponen yang memperjuangkan demokrasi menyepakati bahwa perlunya membangun kekuatan masyarakat sebagai prasyarat terwujudnya demokrasi. Tidak bisa dipungkiri ketika mempersoalkan terjadinya proses demokratisasi disuatu Negara, terlebih dalam hal ini Nepal sebagai sebuah konteks Negara yang awalnya merupakan Negara bersifat monarki, akan terjadi sebuah radikalisisasi yang dibangun dari kekuatan masyarakat. Terkait dengan hal tersebut wacana civil society menjadi sebuah perbincangan menarik, wacana civil society sendiri terkadang selalu menarik dan terkesan tidak pernah usang namun cenderung mengemuka, terlebih

dalam sebuah Negara yang sedang menjalani proses demokrasi, seperti Nepal dewasa ini.

Perjalanan civil society di Nepal sendiri, mengalami berbagai macam halangan, belum lagi kekuasaan Raja Gyanendra yang absolut membuat kekuatan masyarakat menjadi terhalang dalam geraknya. Awal dari peristiwa inilah gerakan pembrontak kaum Maois, melakukan radikalisisasi untuk melawan pemerintahan Gyanendra. Aksi pembangkangan yang dilakukan kelompok oposisi yang terdiri dari partai-partai politik oposisi dan juga aktivis prodemokratisasi ternyata juga ikut mewarnai pertumbuhan civil society, yang harapannya dapat mengubah kehidupan politik dinegeri itu.

Ketika berbicara demokrasi disuatu Negara tentunya ada sebuah keterkaitan tentang terbentuknya proses demokrasi tersebut, adanya suatu entitas yang tumbuh dari kekuatan masyarakat yang hal itu sering kita sebut civil society, dan sering kita lihat apakah Negara yang sudah dianggap demokratis, peran gerakan civil society cukup berpengaruh. Tentunya sebagai perwujudan Negara yang dianggap demokratis peran civil society harapannya dapat tumbuh secara mandiri, dengan satu hal yang perlu kita cermati bahwa tujuan civil society "*bukanlah mengubah melainkan mendemokratiskan masyarakat*", dan sebelum memainkan peran yang diharapkan dalam demokratisasi Negara, civil society harus mengintegrasikan dan mendemokratiskan dirinya sendiri.

Hal ini dapat kita lihat dengan pembahasan yang akan kita teliti, tepatnya di Nepal yang notabene Negara yang mempunyai sistem kerajaan Hindu yang masih tersisa didunia, namun pemerintahannya sudah menjalankan proses demokrasi

sejak tahun 1990, tetapi sikap dan kebijakan kepemimpinan Raja masih sangat absolut dan berpengaruh cukup luas terhadap masyarakat di negeri itu. Sejarah sering memperlihatkan, kegagalan membenahi kehidupan ekonomi terkadang akan membuat sebuah pemerintahan ambruk.

Kondisi Nepal yang miskin ternyata bertambah runyam karena merebak pula gerakan pembangkangan mahasiswa dan aktivis prodemokratisasi terhadap kepemimpinan Raja Gyanendra, yang ternyata mengambil alih kekuasaan sejak Februari 2005, yang tentunya sangat bertentangan dengan konstitusi tahun 1990. Langkah Raja Gyanendra yang dinilai akan menghalangi proses demokratisasi, hal ini sangat bertentangan dengan konstitusi tahun 1990, bahwa kekuasaan Raja ataupun Ratu sebagai kepala Negara bersifat seremonial, sedangkan kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri.

Namun rupanya kekuasaan mendorong Gyanendra sebagai raja yang mengambil alih kekuasaan dengan dalih pemerintah telah gagal menghentikan pembontakan kaum Maois.¹ Pengambilalihan kekuasaan itu sama sekali tidak menghentikan pembontakan yang dilakukan oleh kaum Maois, ternyata gerakan pembontakan ini malah meningkat karena tidak menghendaki sistem kerajaan. Semula masyarakat luas mendukung sistem pemerintahan monarki yang dijalankan di Nepal dan menentang perjuangan pembontak kaum Maois, tetapi karena sama-sama tidak menyukai perilaku kekuasaan Raja Gyanendra, suara yang menentang itu yang dipelopori oleh partai-partai politik, mahasiswa, dan kaum aktivis prodemokrasi terdengar mirip dengan suara kaum pembontak Maois.

¹ Kompas 21 Maret 2006, *Pertempuran Tentara dan Kelompok Maois, 13 Tewas*. hal. 9.

Raja Gyanendra sendiri telah berkuasa secara absolut selama 14 bulan, ketika pada bulan Februari 2005 ia telah membubarkan parlemen dan pemerintahan dengan alasan pemerintah tidak menjalankan fungsinya secara efektif, terutama dalam menangani pembontakan kaum Maois. Gerilyawan kaum Maois sudah sejak tahun 1995 telah mengobarkan bendera perlawanan dan aksi pembontakan untuk menghapuskan sistem pemerintahan monarkhi dan mengubah Nepal menjadi Negara republik,² peristiwa ini juga bersamaan dengan berdirinya pemerintahan multipartai.

Fakta sebuah sejarah telah membuktikan bahwa yang terjadi di Nepal lalu, pada masa pemerintahan Raja Gyanendra menghadapi kekacauan ekonomi, gerakan menentang pemerintahan Gyanendra terus mendekati klimaksnya, setelah berhasil menyerukan aksi pemogokan nasional sebagai bagian dari strategi sabotase dalam bidang ekonomi. Namun, yang paling mendesak sebenarnya adalah bagaimana melepaskan Nepal dari persoalan kemiskinan yang cukup kronis. Upaya untuk meruntuhkan kewibawaan Raja Nepal Gyanendra secara ekonomi tampaknya berlangsung cukup efektif. Ditengah kondisi global saat ini, tentunya sangat berpengaruh pada Negara yang terhitung Negara miskin berpenduduk 27 juta jiwa orang itu.

Kekacauan dalam bidang ekonomi tentunya membuat Gyanendra mulai terancam dari kursi kekuasaannya, ditengah terancamnya pemerintahan Gyanendra kini terjadi pergolakan dan aksi protes menentang Gyanendra yang meningkat di Kathmandu, ibu kota Nepal, di saat yang sama harga-harga bahan pokok

² Kompas, 9 Februari 2006, *Boikot Pemilu Nepal "Berhasil"*. hal. 11.

melambung tinggi. Mentalitas dari bangsa Nepal sebenarnya harus didekonstruksikan, dengan melihat bahwa selama ini warga Nepal terlalu menekankan kehidupan aksetis, dan yang paling penting adalah satu-satunya Negara *teokratis Hinduisme*. Etos kerja kurang nampaknya menjadi sebuah stigma yang ditekankan untuk bangsa Nepal, sehingga proses pembangunan yang berjalan dirasa terlantar, Nepal pun dikenal sebagai salah satu Negara miskin didunia.

Dahulu ketika pada abad ke XVIII, Mayoritas pemerintahan di Negara-negara dengan wilayah territorial yang cukup luas banyak dikuasai oleh sistem monarki. Posisi kekuasaan merupakan sebuah warisan, yang dimana otoritas yang berkuasa mendapatkan kekuasaannya sebagai sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan. Kebanyakan dari hal ini orang tidak menjadi warga Negara dari suatu Negara tertentu yang seharusnya memiliki hak-hak definitif, kemudian dengan hak tersebut memungkinkan mereka terlibat kedalam kehidupan politik.

Pada saat itu di banyak Negara menganggap di mana setiap orang menjadi milik suatu kelompok tertentu, disinilah terdapat sebuah perbedaan antara hak dan Privelege (hak khusus). Kelas yang dianggap spesial, dianggap memiliki pengetahuan yang khusus karena mampu memahami kehendak tuhan. Mereka inilah yang melakukan klaim atas kekuasaan yang bersumber dari sesuatu yang suci (hukum-hukum Tuhan). Selama beberapa abad, kehidupan politik di beberapa tempat memiliki gambaran seperti yang dikemukakan diatas. Kurang dari satu setengah abad kemudian, tepatnya pada Perang Dunia I terjadilah suatu

perubahan. Namun pada saat itu Banyak Negara-negara saat itu bahkan sudah menyetujui pengertian demokrasi sebagaimana yang kita tahu saat ini.

Seperti yang pernah dikatakan Hegel, seorang filsuf ini mengemukakan bahwa dahulu hanya ada satu orang yang berkuasa, yakni dalam pemerintahan monarki. Kemudian ada beberapa orang berkuasa dalam sistem oligarki, saat ini dan kemudian hari ada suatu sistem sosial politik yang akan muncul dan menjadi lestari, sistem itu adalah demokrasi,³ ketika semua orang ingin berkuasa. Inilah yang disebut masyarakat manusia yang sempurna, yang akan menjelma di ujung sejarah manusia.⁴ Dengan demikian sejarah sebenarnya bergerak kearah kemerdekaan manusia, dimana sebuah masyarakat yang merdeka diwujudkan.

Civil society seperti ini dalam hal ini menjadi sebuah mainstream, terlepas dari beragamnya pemaknaan atas konsep ini, civil society sendiri merupakan sebuah istilah yang diperkenalkan Adam Ferguson seorang filsuf berkebangsaan Scotlandia. Dimana dia merujuk kondisi pada masyarakat kota yang sudah tersentuh oleh peradaban maju, yaitu suatu masyarakat yang beradab yang membedakannya dengan masyarakat pedalaman yang belum tersentuh kemajuan. Dalam perkembangannya kemudian civil society di definisikan sebagai sebuah entitas masyarakat yang terdiri dari lembaga-lembaga otonom yang mampu mengimbangi kekuasaan negara.

³ Lihat, Arief Budiman. Teori Negara "Negara, Kekuasaan dan Ideologi." Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1997, hal 15-16.

⁴ Inilah yang menjadi tesis Francis Fukuyama, ketika menulis bukunya tentang akhir dari sebuah sejarah umata manusia (*The End Of History and The Last Man*). Ia pada dasarnya mengatakan bahwa dengan runtuhnya Negara-negara sosialis yang otoriter di Uni-Soviet dan Eropa Timur, negara-negara di dunia akan menjadi demokratis. Ini berarti bahwa sejarah manusia sudah sampai di ujungnya. Lihat, Francis Fukuyama *The End of History and The Last Man Kemenagan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal*, Yogyakarta: Qalam. 2004.

Munculnya kelompok oposisi yang didominasi partai-partai oposisi di Nepal menyerukan agar rakyat Negara tersebut tidak perlu mematuhi dan menuruti kebijakan pemerintah, mereka menyebut tindakan itu dengan sebutan pembangkangan sosial *Civil Disobedience*.⁵ Aksi pembangkangan sosial itu diikuti oleh mayoritas masyarakat Nepal, dan dalam hal ini dipastikan akan menimbulkan keadaan yang menjadi runyam, karena aksi pemogokan ini dilaksanakan selama dua pekan terakhir namun sudah bisa mengacaukan perekonomian negeri miskin tersebut.

Aksi pemogokan itu juga dibarengi dengan terhentinya pemasokan bahan kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak ke berbagai kota, terutama Kathmandu, terhentinya pemasokan tersebut karena sopir umumnya mengikuti seruan pemogokan kelompok oposisi. Krisis ekonomi dan harga-harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi di Negara yang dijuluki "*Atap Dunia*,"⁶ karena letaknya berada diketinggian gunung Himalaya itu hanya menambah kekusaran terhadap kepemimpinan Raja Gyanendra. Selama ratusan tahun Nepal hidup dibawah tradisi *asketik* dan *mediatif Hindu*, dan saat ini pecah oleh kegaduhan politik, peristiwa ini terjadi dalam waktu 10 tahun terakhir.

Akhir pekan lalu sebanyak 33 orang tewas dalam kontak senjata kaum pembontak Maois dengan aparat keamanan. Gerakan kaum Maois telah mengguncangkan panggung politik Nepal, gerakan pembontakan kaum Maois dalam perjalanannya tidak pernah surut sejak tahun 1996, dalam perjalanannya

⁵ Suatu aksi yang termasuk didalamnya menolak membayar pajak, listrik, telepon, dan air serta meneruskan pemogokkan nasional sehingga praktis perekonomian Nepal terancam krisis. Kompas 19 April 2006, *Gerakan Perlawanan Mencapai Klimaks*. hal. 9-10.

⁶ *Ibid.* Kompas 19 April 2006, *Gerakan Perlawanan Mencapai Klimaks*. hal. 9.

selama beberapa tahun banyak yang telah tewas sedikitnya 12.000 orang di negeri yang berpenduduk 22 juta jiwa yang letaknya di punggung pegunungan Himalaya itu.

Tanda-tanda pembontakan sudah muncul sejak tahun 1990, tetapi baru pada tahun 1995 gerilyawan Maois mulai mengobarkan aksi pembontakan bersamaan dengan berdirinya pemerintahan multipartai. Namun aksi pembontakan tersebut makin mengencangkan gerak perlawanannya ketika Raja Gyanendra memimpin secara absolut dan dirasa menghalangi proses demokratisasi di Nepal, kaum pembontak yang domotori oleh kaum Maois menuntut sistem yang ada diganti dengan sistem republik.

Gyanendra sendiri berjanji akan mengembalikan kekuasaan kepada pemerintah melalui hasil pemilihan yang dilaksanakan pada tanggal 8 Februari lalu, namun berdasarkan fakta yang ada, ternyata pemilihan yang diselenggarakan tersebut terkesan sepi dari para pemilih, justru dibalik penyelenggaraan pemilu tersebut terjadi pemboikotan oleh kaum pembontak yang menyebabkan korban jiwa. Nepal mulai menjalankan pemerintahan demokratis yang dibentuk berdasarkan pemilu multipartai sejak tahun 1990, upaya ini dicapai melalui perjuangan berdarah ketika rakyat mengadakan demonstrasi besar-besaran menentang kekuasaan absolut Raja Birendra, kakak Gyanendra.

Sementara itu dalam aksi gerakan pembangkangan terhadap Raja Gyanendra, kubu kelompok Maois sendiri telah menjaga jarak dengan kubu oposisi untuk menangkai tuduhan bahwa gerakan oposisi sudah ditunggangi kelompok Maois. Dalam kesepakatan bersama antara Maois dan kelompok Oposisi, pihak Maois

sendiri setuju bahwa mereka akan bergabung dalam partai politik begitu Raja Gyanendra telah tergusur. Dalam pemilu yang dilaksanakan pemerintah Nepal lalu hanya terlihat antrean pendek, mereka yang mencoblos pada umumnya adalah para pendukung raja dan mereka yang percaya dan tetap patuh terhadap aturan maupun perintah raja.

Pada umumnya mereka yang berpartisipasi dalam pemilihan merasa yakin bahwa dengan mengikuti pemilihan nantinya dapat mewujudkan perdamaian di Nepal. Tetapi yang sangat disayangkan adalah tingkat partisipasi dan mutu penyelenggaraan pemilihan dewan kota di Nepal yang digambarkan sangat rendah. Secara politik Raja Gyanendra sangat terpukul, dengan adanya seruan pemboikotan dan aksi pembangkangan yang cukup sukses sekalipun hasil pemilu memperlihatkan kemenangan mutlak para kandidat yang pro terhadap pemerintah. Prosentase penyelenggaraan pemilu sangatlah rendah yang diakibat oleh salah satunya adalah gangguan serangan kaum pembontak Maois, tembakan yang dilakukan oleh aparat polisi terhadap kaum demonstran, aksi boikot yang digalakkan oleh kaum oposisi, dan partisipasi pemilih yang sangat rendah.

Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat Nepal, merefleksikan sikap protes terhadap kekuasaan Raja Gyanendra yang mengembalikan sistem monarkhi absolut dengan mengambil alih kekuasaan pemerintah. Daris inilah kemenangan para kandidat propemerintah terasa hambar, terutama karena tingkat partisipasi pemilih hanya mencapai sekitar 20 persen, bahkan di Kathmandu hanya memperoleh sekitar 14 persen.⁷ Ini terlihat sejak pemilu dimulai yang hanya

⁷ Ibid, *Gerakan Perlawanan Mencapai Klimaks*. hal.9.

terlihat antrean pendek ditempat-tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Kathmandu, pemandangan serupa juga terjadi di kota Pokhara.

Langkah politik yang dilakukan oleh Raja Gyanendra terkesan terlalalu dini yang akhirnya dapat menimbulkan masalah baru didalam pergolakan politik ditengah ancaman pembontakan yang dilakukan kaum Maois. Pembontakan Kaum Maois tidak pernah surut yang telah menewaskan 12.000 orang selama 10 tahun terakhir.⁸ Posisi Gyanendra pun semakin terpojok ketika kecurigaan menghinggapi dirinya, ada suatu pemberitaan bahwa dirinya berada dibalik tragedi pembunuhan misterius di tahun 2001, yang menewaskan sejumlah anggota inti kerajaan, termasuk Raja Birendra, Ratu Aishwarya, dan putra mahkota Pangeran Dipendra.

Terlepas dari kebenaran dan kecurigaan itu, sikap antipati terhadap Gyanendra merebak luas dikalangan masyarakat Nepal yang berjumlah 27 juta jiwa penduduk tersebut, yang lebih merefleksikan kearifan lama, "raja bijak, raja disembah, raja lalim, raja disanggah".⁹ Gyanendra menggantikan kakanya Birendra menjadi raja sejak 2001 lalu, yang terbunuh dan Birendra juga termasuk raja atau pemimpin yang disanggah rakyatnya, namun Gyanendra pun kurang bisa memperbaiki citra sebagai raja..

Dampak dari itu semua ada harga yang harus dibayar Gyanendra sebagai Raja Nepal, dan tentunya sangatlah mahal, ia bahkan terancam kehilangan segalanya atas permainan politiknya. Tindakan Gyanendra ternyata kontraproduktif, bukan

⁸ Kompas, 10 Februari 2006. Tajuk Rencana, *Raja Disanggah, Pemilu Nepal Sepi*. hal. 6

⁹ Kompas, 8 Agustus 2006. Tajuk Rencana, *Raja Nepal Mulai Dicampakan*. hal. 6.

hanya gerakan Maois yang meningkat, tetapi juga gelombang protes terhadap Gyanendra merebak luas, harga yang harus dibayarnya ternyata tidaklah kecil.

Terjadinya radikalisasi kelompok oposisi dan bangkitnya pembrontakan kaum Maois ini adalah kekecewaan yang lahir dari lapisan masyarakat yang tidak percaya lagi kepada pemerintahan yang berkuasa karena dipandang absolut dan konservatif. Disinilah munculnya sebuah kekuatan yang lahir dari masyarakat sehingga bisa dikatakan sebagai momentum bagkitnya gerakan Civil Society di Nepal, hal ini terbukti ketika pada Pemilu 2005 yang dilaksanakan di Nepal dengan tidak adanya calon yang mau dipilih, diakibatkan semua partai politik posisi di Nepal memboikot pemilu tersebut, akhirnya pemilu itu hanya berlangsung di 36 kota/kabupaten dan tidak bisa dilangsungkan di 22 lokasi lainnya.

D. Rumusan Masalah

Dari pembahasan diatas maka muncul sebuah masalah sebagai berikut

Mengapa gerakan civil society menjadi sangat signifikan pengaruhnya dalam transisi demokrasi di Nepal pada tahun 2005 ?

E. Kerangka Teori

- **Konsep Demokrasi Menurut Samuel P. Huntington**

Dalam hal ini penulis mencoba menelaah lebih dalam tentang konsep demokrasi yang dikemukakan oleh Samuel P. Huntington, termasuk didalamnya menerangkan secara sistematis tentang bagaimana proses demokratisasi itu

terbentuk. Untuk itu ada sebuah tinjauan kritis dalam menganalisis konsep ini, ada tiga tipe proses besar dalam konsep demokrasi menurut Samuel P. Huntington, yang tentunya berkaitan dengan bagaimana proses perwujudan demokrasi itu terbentuk.

Dibawah ini adalah merupakan tipe-tipe sebuah proses demokratisasi di Negara-negara gelombang ketiga dan sebuah Tabel, yang menggambarkan rezim disuatu Negara yang digolongkan menurut tipe yang tampak dominan pada awal proses transisi rezim tersebut.

Pertama, Transformasi atau *reforma*, dalam istilah Juan J. Linz. Hal ini terjadi ketika elite yang berkuasa memelopori proses perwujudan demokrasi. Adapun yang kedua, dengan apa yang disebut *Replacement* atau "*ruptura*" dalam istilah Juan J. Linz, atau yang biasa diistilahkan sebagai Pergantian, hal ini terjadi apabila kelompok oposisi memelopori proses perwujudan demokrasi, dan rezim yang otoritarian itu tumbang atau digulingkan. Dan yang selanjutnya apa yang kemudian dapat diistilahkan sebagai *Transplacement* atau "*ruptforma*."

Rezim

Proses	Satu-Partai	Perorangan	Militer	Oligarki Rasial
<i>Trans-formasi</i>	(Taiwan) [#] Hongaria (Meksiko) (Uni Soviet) Bulgaria	Spanyol India Cile	Turki Brazil Peru Ekuador Guatemala Nigeria* Pakistan Sudan	-
<i>Trans-placement</i>	Polandia Cekoslowakia Nikaragua Mongolia	(Nepal)	Uruguay Bolivia Honduras El Savador Korea	(Afrika Selatan)
<i>Replace-ment</i> (Pergantian)	Jerman Timur	Portugal Filipina Rumania	Yunani Argentina	-
Intervensi	Grenada		(Panama)	-

Sumber: Samuel Huntington, Gelombang Demokratisasi Ketiga, *The Third Wave: Democratization in The Late Twentieth Century*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995, hal.145.

Hal ini terjadi apabila demokratisasi terutama merupakan hasil tidakan bersama kelompok pemerintah dan kelompok oposisi.¹⁰ Pada hampir semua

Catatan : Kriteria utama proses demokratisasi adalah pemilihan sebuah pemerintah melalui pemilihan yang diselenggarakan secara terbuka, kompetitif dan diikuti seluruh peserta, serta jujur dan adil.

[#] Menunjukkan negeri yang secara signifikan telah mengalami liberalisasi, namun tidak mengadakan demokratisasi sebelum tahun 1990.

* Menunjukkan negeri yang kembali pada otoriterisme.

¹⁰ Karena alasan-alasan yang jelas berakar pada sifat manusia, para pemikir sering memiliki gagasan yang sama, namun lebih sering menggunakan kata yang berbeda untuk mengacu pada gagasan itu. Pembagian proses transisi kedalam tiga bagian yang oleh Samuel Huntington jelaskan disini, ternyata sama dengan pembagian yang dilakukan oleh Donald Share dan Scott Mainwaring, tetapi masing-masing dari itu semua mempunyai istilah sendiri. Untuk proses-proses itu:

Huntington

(1). Transformasi

Juan J. Linz

= Reforma

Share/Mainwaring

= Transaction

kasus, kelompok-kelompok yang berada didalam pemerintahan maupun yang berada diluarnya memainkan sejumlah peran, dan kategori-kategori ini hanya membedakan peranan relatif antara pemerintah dan pihak oposisi.

Adapun tipe-tipe ini akan dijelaskan satu-persatu secara sistematis, yaitu sebagai berikut:

A. Transformasi (*Reforma*)

Pada transformasi pihak-pihak yang berkuasa dalam rezim otoriter mempelopori dan memainkan peran yang menentukan dalam mengakhiri rezim itu, serta mengubahnya menjadi sebuah sistem yang demokratis. Garis pemisah antara transformasi dan *transplacement* tidak jelas, dalam sejumlah kasus mungkin dapat dikategorikan secara abasah sebagai salah satu kategori. Namun secara keseluruhan transformasi menjadi penyebab sekitar 16 dari 35 transisi gelombang ketiga yang telah berlangsung atau mulai berlangsung menjelang akhir dasawarsa 1980. Keenambelas kasus liberalisasi atau demokratisasi ini meliputi perubahan yang terjadi pada lima buah sistem satu partai, tiga buah kediktatoran perorangan, dan delapan rezim militer.

Transformasi mensyaratkan pemerintahan lebih kuat daripada kelompok oposisi. Dengan demikian, transformasi terjadi dalam rezim militer yang telah mapan dimana pemerintah secara jelas mengendalikan alat-alat koersi yang utama kalau dibandingkan dengan pihak oposisi atau dibandingkan dengan sistem

-
- | | | |
|---------------------|-----------|--------------------------------|
| (2). Replacement | = Ruptura | = Breakdown/ Collapse(tumbang) |
| (3). Transplacement | = _____ | = Extrication |

Lihat, Juan J. Linz, *Crisis, Breakdown, and Reequilibration, dalam The Breakdown of Democratic Regimes*, ed. Juan J. Linz dan Alfred Stepan (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1978), hal. 35; Donald Share dan Scott Mainwaring, *Transition Through Transaction: Democratization in Brazil and Spain*, dalam *Political Liberalization in Brazil: Dynamics, Dilemmas, and Future Prospects*, ed. Wayne A. Selcher (Boulder, Colo: Westview Press, 1986), hal. 177-179.

otoriter yang sukses secara ekonomi, seperti Spanyol, Brazil, Taiwan, dan Meksiko, atau jika dibandingkan dengan negeri-negeri komunis lain, seperti Hongaria. Transformasi gelombang ketiga biasanya berkembang melalui lima fase utama, yang empat diantaranya terjadi didalam sistem otoriter, yaitu sebagai berikut:

1. Munculnya Kelompok Pemabaharu.

Langkah yang pertama adalah munculnya sekelompok pemimpin atau orang-orang yang berpotensi menjadi pemimpin di dalam rezim otoriter yang percaya bahwa gerakan kearah demokrasi adalah suatu yang dikehendaki atau diperlukan. Mengapa mereka berkesimpulan demikian ? alasannya mengapa orang menjadi pembaharu demokratisasi sangat bervariasi, namun alasan-alasan itu dapat dikelompokkan kedalam lima kategori. Pertama, para pembaharu sering menyimpulkan bahwa biaya untuk tetap berkuasa, seperti mempolitisasi angkatan bersenjata mereka, memecah-belah koalisi yang telah mendukung mereka, dan meningkatkan represi yang telah mencapai titik dimana tindakan keluar dari kekuasaan secara terhormat merupakan hal yang dikehendaki. Kedua, dalam beberapa kasus para pembaharu ingin memperkecil resiko yang mereka hadapi apabila mereka mencoba mempertahankan kekuasaan dengan susah payah dan pada akhirnya kehilangan kekuasaan itu.

Ketiga, dalam beberapa kasus termasuk India, Cile, dan Turki para pemimpin otoriter percaya bahwa mereka tau rekan-rekan mereka tidak akan kehilangan jabatan. Keempat, para pembaharu sering percaya bahwa demokratisasi akan menghasilkan manfaat bagi negeri mereka, seperti meninggalkan legitimasi

internasionalnya. Akhirnya dalam banyak kasus termasuk Spanyol, Brazil, Hongaria, dan Turki, dan rezim militer lainnya para pembaharu percaya bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang benar.

2. Memperoleh Kekuasaan

Para pembaharu demokratis tidak hanya harus ada dalam rezim otoriter, mereka juga berkuasa dalam rezim itu. Bagaimana hal ini terjadi? dalam beberapa kasus berikut ini para pemimpin yang menciptakan rezim otoriter memimpin transisi kearah demokrasi. Di India dan Turki, sejak semula rezim otoriter dianggap sebagai interupsi dalam pola demokrasi yang formal. Rezim-rezim itu tidak lama berkuasa dan berakhir dengan pemilihan umum yang diorganisasi oleh para pemimpin otoriter yang keliru mengantisipasi bahwa mereka atau calon-calon yang mereka dukung akan memenangkan pemilihan umum tersebut. Kelompok pembaharu memperoleh kekuasaan dalam rezim otoriter melalui beberapa cara. Yang salah satunya, seperti para pendiri rezim otoriter yang telah lama berkuasa seperti Juan Carlos dan Chiang Ching-kuo, sebagai pengganti yang ditunjuk untuk mengambil alih pemerintahan untuk menanggapi perubahan-perubahan sosial ekonomi yang penting yang telah terjadi di negeri mereka dan memulai proses demokratisasi.

3. Kegagalan Liberalisasi

Persoalan kritis dalam gelombang ketiga menyangkut masalah peranan kelompok pembaharu liberal dan stabilitas dari sebuah negeri otoriter yang mengalami liberalisasi. Para pembaharu liberal yang menggantikan para pemimpin konservatif biasanya merupakan sosok-sosok pelaku transisi yang

hanya berkuasa sebentar. Di Taiwan, Hongaria, dan Meksiko para pemimpin liberal segera digantikan oleh para pembaharu yang lebih condong pada demokrasi. Di Brazil, meskipun beberapa analisis meragukan hal ini, agaknya cukup jelas bahwa Geisel dan Golbery dari semula bertekad untuk melaksanakan demokratisasi yang berarti. Sekalipun mereka hanya bermaksud meliberalisasikan sistem otoriter dan tidak bermaksud menggantinya, namun Figueiredo memperluas proses itu kearah demokratisasi. Ia harus mengubah negerinya menjadi suatu demokrasi, hal itu terjadi pada tahun 1978 sebelum ia menjabat, dan pada saat itu ia benar-benar melakukannya.¹¹

4. *Legitimasi ke Masa Lalu: Menaklukkan Kelompok Konservatif.*

Keberhasilan kelompok pembaharu memperoleh kekuasaan memungkinkan dimulainya proses demokratisasi, tetapi keberhasilan itu tidak menghilangkan kemampuan kelompok konservatif untuk menantang kelompok pembaharu tersebut. di Afrika Selatan dan di Hongaria faksi-faksi konservatif memisahkan diri dari partai-partai yang dominan, sambil menuduh bahwa mereka telah mengkhianati prinsip-prinsip yang melandasi partai-partai tersebut. pemerintah yang melakukan reformasi mencoba menetralisasi oposisi kelompok konservatif dengan melemahkan, menenangkan dan mengubah keyakinan kelompok konservatif.

Untuk menghadapi tantangan kelompok konservatif sering dibutuhkan pemutusan kekuasaan dalam tangan eksekutif utama reformasi. Sebaliknya kelompok pembaharu mencari dukungan dari kelompok konservatif dengan

¹¹ Dikutip dalam Francisco Weffort, *Why Democracy?* dalam *Democratizing Brazil*, ed. Stepan, hal. 332.

mengajukan alasan bahwa mereka mencegah terjadinya oposisi yang radikal dan dengan demikian meminimalkan tingkat kelabilan dan tingkat kekerasan.

5. *Mengikutsertakan Kelompok Oposisi.*

Kelompok pembaharu demokratis biasanya segera memulai proses demokratisasi begitu mereka memperoleh kekuasaan. Lazimnya hal ini melibatkan konsultasi dengan pra pemimpin dari kelompok oposisi, partai politik, dan kelompok serta lembaga utama masyarakat. Dalam beberapa hal, perundingan-perundingan yang relatif formal terjadi dan kesepakatan atau fakta yang eksplisit dicapai. Dalam kasus-kasus lain, konsultasi dan perundingan lebih bersifat informal.

Ketika kelompok pembaharu mengalienasi kelompok konservatif yang berada dalam koalisi yang berkuasa, mereka harus memperkuat kedudukan mereka dengan menggalang dukungan dari kelompok oposisi dan memperluas arena politik serta mencari dukungan dari kelompok-kelompok baru yang menjadi aktif di dalam politik sebagai akibat keterbukaan itu. Para pembaharu yang pandai memanfaatkan tekanan kelompok-kelompok ini yang makin besar kearah demokratisasi untuk melemahkan kelompok konservatif, dan memanfaatkan ancaman kudeta yang akan dilakukan oleh kelompok konservatif serta memanfaatkan insentif untuk diikuti sertakan dalam pemerintahan guna memperkuat kelompok-kelompok moderat di pihak oposisi. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, kelompok pembaharu dalam pemerintahan berunding dengan kelompok-kelompok oposisi yang utama dan mencapai kesepakatan dengan mereka secara terbuka atau secara diam-diam.

B. Replacements (Pergantian)

Proses replacement sangat berbeda dengan proses transformasi, kelompok pembaharu tersebut masih lemah atau tidak ada dalam rezim itu. Unsur-unsur yang dominan dalam pemerintahan adalah kelompok konservatif yang dengan gigih menentang perubahan rezim. Sebagai akibatnya, demokratisasi baru bisa terwujud apabila kelompok oposisi semakin kuat dan pemerintah semakin lemah sehingga jatuh dengan sendirinya atau digulingkan. Kelompok yang awalnya merupakan kelompok oposisi kini berkuasa dan manakala kelompok-kelompok dalam pemerintahan yang baru saling berselisih mengenai hakikat rezim yang seharusnya mereka lembagakan, maka konflik itu kemudian sering memasuki fase baru.

Secara singkat kata, proses replacement terdiri dari tiga fase yang berbeda yaitu: perjuangan untuk menumbangkan rezim, tumbangnya rezim, dan perjuangan setelah tumbangnya rezim. Kebanyakan demokratisasi dalam gelombang ketiga mensyaratkan kerjasama dari para penguasa, hanya enam replacement terjadi menjelang tahun 1990. Replacement jarang terjadi dalam transisi pada sistem satu partai hal ini terjadi pada (satu dari tujuh kasus), dan dalam transisi pada rezim militer terjadi pada (dua dari enam belas kasus).

Dalam *replacement*, tidak ada penekanan pada kesinambungan prosedur dan legitimasi ke masa lalu seperti terdapat dalam transformasi. Lembaga, prosedur, gagasan, dan orang-orang yang ada hubungannya dengan rezim terdahulu dianggap telah tercemar sehingga yang ditekankan adalah keputusan sama sekali

hubungan dengan masa lalu. Mereka yang menggantikan penguasa otoriter mendasarkan pemerintahan mereka pada legitimasi ke masa depan, sesuatu yang akan mereka wujudkan dimasa datang dan kurangnya keterlibatan mereka atau hubungan mereka dengan rezim terdahulu.

Dalam transformasi dan *transplacement* para pemimpin rezim otoriter biasanya meninggalkan dunia politik dan kembali dengan tenang ke kehidupan pribadi mereka sambil membawa martabat serta rasa hormat dari orang lain. Sebaliknya pemimpin-pemimpin otoriter yang kehilangan kekuasaan mereka dalam proses replacement mengalami nasib yang menyedihkan. Marcos dan Caetano dipaksa menyingkir ke pengasingan, lain halnya dengan Ceausescu yang dieksekusi tanpa ampun. Sedangkan pejabat-pejabat militer yang memerintah Yunani dan Argentina diadili dan dipenjara. Di Jerman Timur, Honecker dan para mantan pemimpin lainnya diancam dengan hukuman.

Keruntuhan suatu rezim otoriter yang berlangsung secara damai biasanya menimbulkan suasana kemenangan yang ditandai dengan luapan kegembiraan masyarakat. Keruntuhan itu juga menimbulkan kevakuman kekuasaan yang potensial, suatu kondisi yang tidak dijumpai dalam proses transformasi. Di Iran, kevakuman kekuasaan itu diisi oleh Ayatollah Khomeini yang memimpin Iran menuju sistem pemerintahan lain. Di Argentina dan Jerman-Timur pemerintahan Bignone dan pemerintahan Modrow yang lemah mengisi masa transisi antara runtuhnya rezim otoriter dengan terpilihnya pemerintah yang demokratis.

Sebelum keruntuhan itu, kelompok-kelompok oposisi dipersatukan oleh hasrat mereka yang besar untuk mewujudkan keruntuhan tersebut. Setelah hasrat itu

terwujud, timbul perpecahan dan perselisihan di antara mereka mengenai distribusi kekuasaan dan sifat rezim baru yang harus didirikan. Nasib demokrasi ditentukan oleh perimbangan kekuatan kelompok moderat demokratis dan kelompok radikal antidemokrasi. Runtuhnya kediktatoran di Iran, Nikaragua, Portugal, dan Rumania yang menimbulkan pertarungan diantara kelompok-kelompok dan partai-partai oposisi terdahulu mengenai siapa yang akan menyelenggarakan pemerintahan dan rezim macam apa yang akan mereka ciptakan.

Sejarah *replacement* memberi petunjuk-petunjuk berikut ini, bagi kelompok moderat demokratis di pihak oposisi yang mencoba menggulingkan suatu rezim otoriter.¹²

(1). Memusatkan fokus permasalahan dengan memperhatikan pada ketidakabsahan atau keabsahan yang meragukan dari rezim otoriter, yang tentunya merupakan titik terlemah dari faktor tersebut. Selanjutnya kemudian mengcounter rezim otoriter tersebut dengan isu-isu umum yang menjadi keprihatinan banyak masyarakat, seperti korupsi dan kebrutalan. Apabila rezim itu berhasil, terutama dalam bidang ekonomi, aksi-aksi ini tidak akan efektif.

(2). Seperti halnya dengan penguasa demokratis, para penguasa otoriter dari waktu ke waktu mengalienasi bekas pendukung mereka. Dorongan kelompok-

¹² Myaron Weiner telah merumuskan seperangkat rekomendasi yang lebih ringkas: bagi orang-orang yang mengupayakan dan memperjuangkan demokratisasi, pelajaran yang dapat diambil adalah sebagai berikut: mobilisasi oposisi tanpa kekerasan berskala besar terhadap rezim itu, mencari dukungan dari pihak tengah dan apabila perlu, dari kelompok sayap kanan konservatif, kendalikan kelompok sayap kiri dan halangi mereka mendominasi agenda gerakan, dapatkan dukungan kelompok-kelompok militer, dapatkan liputan yang simpatik dari media Barat, dan tekan AS supaya mau memberi dukungan. *Empirical Democratic Theory and Transition from Authoritarianism to Democracy*, PS 20 (musim gugur 1987), hal 866.

kelompok yang tidak puas ini agar mendukung demokrasi sebagai alternatif yang dibutuhkan bagi sistem yang sedang berlangsung. Dengan melakukan upaya-upaya tertentu untuk memperoleh dukungan para pemuka bisnis, para profesional kelas menengah, para pemuka agama, dan pemimpin-pemimpin partai politik, yang sebagian besar diantaranya barangkali pernah mendukung pembentukan sistem otoriter tersebut. maka semakin tampak terhormat dan bertanggung jawab, darisinitulah akan semakin mudah kelompok oposisi memperoleh lebih banyak pendukung.

(3). Menurunnya peran para Jenderal yang pada akhirnya tumbang, dalam hal ini paling tidak rezim itu bergantung pada para jenderal yang mendukung rezim tersebut. Dukungan pihak militer bisa bermanfaat ketika krisis datang, namun yang benar-benar diperlukan hanyalah ketidakbersediaan pihak militer untuk membela rezim tersebut.

(4). Mempraktekan aksi tanpa kekerasan, dengan aksi semacam ini antara lain akan mempermudah dalam memperoleh dukungan militer, sebab para prajurit cenderung tidak bersimpati terhadap orang-orang yang menciptakan permusuhan kepada mereka.

(5). Melakukan langkah kritis pada setiap peluang untuk menyatakan oposisi terhadap rezim, termasuk partisipasi dalam pemilihan umum yang diorganisasi rezim tersebut.

(6). Membina hubungan baik dengan media internasional, organisasi-organisasi hak asasi manusia di luar negeri, khususnya memobilisasi pendukung di Amerika Serikat. Anggota-anggota kongres Amerika yang selalu mencari

alasan-alasan moral untuk memperoleh publisitas dan memanfaatkannya untuk menentang pemerintah Amerika.

(7). Menggaalng persatuan diantara kelompok-kelompok oposisi. menciptakan organisasi-organisasi yang memayungi semua kelompok oposisi untuk melancarkan kerjasama diantara kelompok-kelompok semacam itu. Seperti dalam pernyataan Gabriel Almond: "*Pemimpin-pemimpin yang besar adalah pendiri koalisi yang besar.*"

(8). Namun ketika rezim otoriter jatuh, bersiaplah untuk segera mengisi kevakuman kekuasaan yang terjadi. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan, mengajukan seseorang pemimpin yang populer, yang memiliki kharisma, dan condong kepada demokrasi, serta menyelenggarakan secepatnya pemilihan umum untuk memperoleh legitimasi rakyat, guna mewujudkan pemerintahan yang baru.

C. Transplacements

Pada *transplacement* demokratisasi merupakan hasil aksi bersama pemerintah dan kelompok oposisi. Didalam pemerintah itu sendiri keseimbangan antara kelompok konservatif dengan kelompok pembaharu sedemikian rupa sehingga pemerintah bersedia merundingkan, namun tidak bersedia memprakarsai perubahan rezim, berbeda dengan situasi dimana dominasi kelompok konservatif menimbulkan *replacement*. Dalam hal ini pemerintah harus didorong atau ditarik kedalam perundingan formal dan informal dengan pihak oposisi.

Lain halnya dipihak oposisi, kelompok moderat yang demokratis cukup kuat untuk mengendalikan kelompok radikal yang antidemokrasi, tetapi mereka tidak cukup kuat untuk menggulingkan pemerintah, oleh karena itu mereka juga melihat

faedah perundingan. Sekitar 11 dari 35 peristiwa liberalisasi dan demokratisasi yang terjadi ataupun yang berlangsung pada tahun 1970-an dan 1980-an mendekati model *transplacement*. Yang paling signifikan diantaranya adalah Polandia, Cekoslowakia, Uruguay, dan Korea. Perubahan rezim di Bolivia, Honduras, El Salvador, dan Nikaragua juga mengandung unsur-unsur penting dari *transplacement*.

Pada tahun 1989 dan 1990, Afrika Selatan, memulai proses *transplacement*, dan Mongolia serta Nepal tampak sudah bergerak kearah yang sama, dengan melihat persoalan-persoalan yang terjadi baik di Nepal maupun di Mongolia sendiri. Beberapa ciri *transplacement* yang terjadi di Nepal belum lama ini, memperlihatkan bahwa pemerintahan raja Gyanendra cukup kuat untuk menahan tekanan pihak oposisi untuk merundingkan demokratisasi dan secara keras tetap mengikuti jadwal perubahan pemerintahan yang ditetapkannya pada tahun 2006 ini.

Dalam *transplacement* yang sukses, kelompok-kelompok yang dominan dalam pemerintahan dan oposisi menyadari bahwa mereka tidak mampu menetapkan secara sepihak sifat sistem politik masyarakat mereka di masa depan. Pemerintah dan para pemimpin oposisi sering memiliki pandangan ini setelah saling menguji kekuatan masing-masing dan menyelesaikannya dalam suatu dialektika politik. Pada mulanya pihak oposisi biasanya percaya bahwa pihaknya akan mampu menjatuhkan pemerintahan pada waktu yang tidak terlalu jauh di masa mendatang.

Kepercayaan ini kadangkala sangat tidak realistik, tetapi sepanjang para pemimpin oposisi berpandangan demikian, perundingan serius dengan pemerintah adalah mustahil terjadi. Sebaliknya, pada tahap awal pemerintah biasanya percaya bahwa ia dapat mengendalikan dan menindas pihak oposisi dengan efektif tanpa harus menanggung resiko yang tidak bisa diterima. *Transplacement* terjadi bila kepercayaan kedua pihak itu telah berubah, pihak oposisi telah menyadari bahwa mereka tidak cukup kuat untuk menggulingkan pemerintah.

Namun sebaliknya pemerintah menyadari bahwa pihak oposisi cukup kuat untuk memperbesar biaya akibat tidak diadakannya perundingan dalam bentuk meningkatnya represi yang akan mengalienasi lebih lanjut kelompok-kelompok itu dari pemerintah, memunculkan perpecahan didalam koalisi yang berkuasa, memperbesar kemungkinan terjadinya pengambilalihan pemerintah oleh kelompok garis keras, dan kerugian yang cukup besar pada legitimasi internasional. Dialektika *transplacement* sering melibatkan langkah-langkah dalam urutan yang berbeda satu sama lain.

Pertama, pemerintah sibuk dengan proses liberalisasi dan mulai kehilangan kekuasaan dan otoritasnya. Kedua, pihak oposisi mengeksploitasi pelanggaran ini dan memanfaatkan melemahnya pemerintah untuk memperluas dukungan dan mengintensifkan kegiatannya dengan harapan dan perkiraan bahwa mereka akan segera mampu menjatuhkan pemerintah. Ketiga, pemerintah bereaksi keras dengan membendung dan menekan upaya oposisi pihak oposisi memobilisasi kekuasaan politik. Keempat, pemerintah dan para pemimpin oposisi menyadari munculnya kekuatan tandingan yang seimbang dan mulai menjajaki

kemungkinan-kemungkinan untuk mengadakan transisi yang disetujui kedua belah pihak.

Namun langkah keempat diatas bukanlah langkah yang tak terelakan. Dengan demikian *transplacement* mensyaratkan kekuatan yang kurang lebih berimbang antara pemerintah dengan pihak oposisi serta ketidakpastian masing-masing pihak tentang siapa yang akan menang dalam suatu uji kekuatan utama. Karena itulah, proses politik yang mengarah pada *transplacement*, sering ditandai oleh tarik-menarik antara pemogokan, protes dan demonstrasi disuatu pihak dengan represi, pemenjaraan, tidak kekerasan oleh aparat kepolisian, keadaan darurat, hukum darurat perang dilain pihak.

Dalam *transplacement*, konfrontasi secara langsung antara massa demonstran dan barisan polisi yang besar jumlahnya dilapnagn pusat ibukota menelanjangi kekuatan dan kelemahan masing-masing pihak. Pihak oposisi dapat memobilisasi dukungan massa, pemerintah dapat menahan dan mengatasi tekanan pihak oposisi. Oleh sebab itu *transplacement* mensyaratkan para pemimpin pada kedua belah pihak bersedia menanggung resiko untuk berunding.

Di Nepal sendiri proses perundingan berjalan cukup sulit dilakukan, pemerntahan raja Gyanendra berkehendak untuk menghindari perundingan, namun pemogokan-pemogokan berskala besar meletus pada awal 2006 lalu, tetapi pemogokan yang berskala nasional itu ditumpas oleh pemerintah dengan cara represif. Pada *transplacement* sendiri berbeda dengan *transformasi* dan *replacement*, pemimpin-pemimpin pemerintah sering merundingkan syarat-syarat

mendasar bagi perubahan rezim dengan pemimpin-pemimpin oposisi yang sebelumnya pernah mereka tawan atau mereka penjarakan.

- **Konsep Civil Society**

Relevansi Pemberdayaan Civil Society

Civil society sebagai sarana pengembangan demokrasi dan memelihara kultur demokratisasi, civil society merupakan inti kultur politik yang sangat esensial bagi sosialisasi warga Negara. Lebih jauh civil society disini adalah sebagai sarana penjamin stabilitas demokrasi, pencegah dominasi satu kelompok terhadap kelompok lain, penggalang individu untuk bekerja sama. Civil society dalam hal ini tidak berupaya menentang Negara, dan pengurangan peran Negara bukanlah tujuan yang utama.

Starategi pemberdayaan dan penguatan civil society seharusnya ditujukan kearah pembentukan gradual suatu masyarakat politik yang demokratis, parsipatoris, dan reflektif. Disamping itu kemudian ia mampu menjadi penyeimbang dan kontrol bagi kecendrungan-kecendrungan ekksesif Negara. Dalam hal ini tentunya pertama-tama perlu adanya landasan tumpu yang sama (*common ground*) bagi gerakan-gerakan alternatif dan kultur bagi penguatan civil society. Landasan tumpu inilah merupakan pijakan normatif yang didalamnya semua aktifitas, perbedaan orientasi ideologis, dan proses menemukan persamaan.

Kemudian pada tingkat struktur dan sistem perlu dilakukannya reorientasi terhadap perjuangan demokratik untuk lebih menekankan pada pencapaian masyarakat politik yang demokratis secara bertahap, transformatif, dan berjangka

panjang. Dibandingkan dengan upaya-upaya perubahan sistem radikal yang pada umumnya tidak memiliki kemampuan terhadap mikro, sektoral, grass-roots, dan dalam komunitas-komunitas kecil namun tetap dikaitkan dengan tingkat nasional dan lintas sektoral. Pada tingkat sosio-kultural, maka strategi demokratisasi lewat penguatan civil society dijalankan dengan cara penanaman dan pengembangan secara terus menerus; tentunya pada budaya sipil dalam masyarakat dari pada prakarsa dan peran serta Negara dalam proses-proses pembentukan subjek-subjek politik (*political subject*), serta pranata-pranata social politik (*political institutions*).

Gerakan civil society sebagai lembaga intermediasi negara dengan rakyat dapat melakukan fungsi ganda, yaitu melakukan pemberdayaan masyarakat (*sociatri empowerment*), dan selanjutnya kemudian dapat meminjam istilah Anthony Giddens,¹³ melakukan demokratisasi atas demokrasi dengan menekankan pada pendalaman demokrasi (*a deepening democracy*). Seperti yang dikemukakan oleh Giddens bahwa Negara dan civil society harus bermitra, saling memberikan kemudahan, dan saling mengontrol. Pemerintah dalam hal ini seharusnya bisa memainkan peran utama dalam pembaruan kultur masyarakat.

Pemberdayaan civil society bisa dilakukan dengan salah satunya, seperti yang disebut Giddens sebagai pembaruan Masyarakat madani¹⁴ yaitu:

1. Kemitraan antara pemerintah dan masyarakat madani.
2. Pembaruan komunitas dengan meningkatkan prakarsa lokal.
3. Keterlibatan sektor ketiga.

¹³ Lihat, Anthony Giddens, *The Third Way The Renewal of Social Democracy, Jalan Ketiga Pembaruan Demokrasi Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002, hal. 80-81.

¹⁴ *Ibid*, hal 91.

4. Perlindungan ruang publik lokal.
5. Pencegahan kejahatan dengan basis komunitas.
6. Keluarga demokratis.

Civil society merupakan konsep tentang keberadaan satu masyarakat yang di dalamnya ada batas-batas tertentu yang mampu memajukan dirinya sendiri melalui penciptaan aktifitas mandiri, dalam satu gerak yang tidak memungkinkan Negara melakukan intervensi. Penekanan ini diberikan pada hak-hak dasar individual sebagai manusia maupun warga Negara. Penekanan diatas membuat konsep civil society sangat erat kaitannya dengan konsep *demokrasi* dan *demokratisasi*. Demokrasi hanya mungkin tumbuh dalam civil society, dan civil society hanya mungkin berkembang dalam iklim yang demokratis.

Prinsip civil society pada hakikatnya hanya menginginkan kesejajaran hubungan antara warga Negara dengan Negara atas dasar prinsip saling menghormati. Civil society sendiri berkeinginan membangun hubungan yang bersifat konsultatif antara warga Negara dengan Negara, dan sifatnya bukan konfrontatif seperti yang terjadi selama ini di Negara-negara Dunia Ketiga. Civil society tidak hanya bersikap dan berperilaku sebagai *citizen*¹⁵ yang memiliki hak dan kebebasan, dan kemudian juga harus menghormati *equal rights*, yang memperlakukan semua warga Negara sebagai pemegang hak dan kebebasan yang sama.¹⁶ Pemaksaan kehendak oleh satu orang, atau satu kelompok masyarakat

¹⁵ Riswandha Imawan, *Membongkar Mitos Masyarakat Madani*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, hal. 103-120.

¹⁶ Ramlah Surbakti, *Membangun Masyarakat Kewargaan dari Segi Politik dan Ekonomi*, Makalah tersebut disampaikan dalam Seminar Pengembangan Ilmu Pemerintahan, Institut Ilmu Pemerintahan, Jakarta, 9 Januari 1995.

kepada orang atau kelompok masyarakat yang lain merupakan pengingkaran terhadap prinsip civil society.

Terkait dengan persoalan diatas, dalam hal ini peran Negara hanya diharapkan dapat melakukan tiga hal¹⁷ yaitu:

1. Menjamin hak-hak asasi warga Negara.
2. Menghormati eksistensi ruang dan wacana publik.
3. Melaksanakan hal-hal yang telah disepakati sebagai batas kewenangan masing-masing.

Adapun yang dimaksud dengan adanya Hak azasi warga Negara, seperti kebebasan berpendapat yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. Yang kedua adalah harus adanya ruang publik, diamana antar warga Negara berinteraksi secara damai untuk dapat memecahkan masalah yang mereka hadapi, yang ruang itu tidak dapat di intervensi oleh Negara. Demikian pula harus adanya wacana publik sebagai instrumen penyampaian aspirasi terhadap Negara, yang wacana itu tidak dapat di berangus tanpa landasan hukum yang kuat oleh Negara.

Dari uraian singkat diatas bahwa adanya civil society sebagai intermediasi Negara dalam hal ini akan meringankan tugas Negara. Negara hanya memfasilitasi masyarakat, dan tentunya mengingatkan mereka pada tujuan bersama, yakni kesejahteraan umum. Kekuasaan Negara harus dibatasi demi kepentingan masyarakat. Karena hal yang demikian akan semakin sempurna bentuk civil society, dan tentunya akan semakin besar peluang warga Negara

¹⁷ Riswandha Imawan. *op.cit.* hal 110.

untuk mengatur kehidupan mereka sendiri.¹⁸ Wacana tentang civil society atau masyarakat sipil¹⁹ sebagai entitas yang diharapkan mampu mengimbangi peranan (*state*) dalam pengelolaan politik, ekonomi, dan sosial, serta penguatannya sebagai strategi dalam proses demokratisasi tampaknya semakin hari semakin berkembang.

Penguatan civil society, telah diperjuangkan secara sungguh-sungguh di Negara-negara yang baru saja terlepas dari sistem totaliter di Eropa Timur dan bekas Uni Soviet. Ia juga diasumsikan memiliki tingkat relevansi yang tinggi sebagai strategi demokratisasi di Negara-negara sedang berkembang lainnya di Asia, Afrika dan Amerika Latin. Tidaklah heran apabila kecenderungan analisis politik mutakhir yang berkaitan dengan demokratisasi semakin diwarnai oleh pendekatan-pendekatan yang menonjolkan (*valorize*) peran civil society.²⁰

Walaupun harus diakui bahwa pengertian tentang civil society sendiri begitu beragam²¹ sebagai akibat dari perbedaan-perbedaan perspektif teoritis yang digunakan, namun masih sulit untuk dipungkiri bahwa ia menjadi salah satu

¹⁸ Adam Seligman, *The idea Civil Society*, (New York, N. Y: The Free Press, 1992).

¹⁹ Istilah *masyarakat sipil* yang digunakan di Indonesia sebagai terjemahan dari *civil society*, masih kurang mampu mencerminkan esensi pengertian ini. Oleh karenanya, dalam tulisan ini penggunaan kata *civil society* masih akan dipergunakan.

²⁰ Lihat: G.O'Donnell, et.al. (eds). *Transition from Authoritarian Rule: Prospect for Democracy*, Baltimore: John Hopkins University Press, 1986; J. Keane, *Democracy and Civil Society*, London: Verso, 1988.

²¹ Untuk survai mengenai konsep *civil society*, lihat antara lain A. Arato, dan J. Cohen, *Civil Society and Political Theory*, Cambridge: MIT Press, 1993; J. Keane, *Democracy and Civil Society*, London: Verso, 1988; J. Keane, (eds.), *Civil Society and The State: New European Perspective*, 2nd ed., London: Verso 1989; A. Arato, dan J. Cohen, "Social Movement, Civil Society and The Problem of Sovereignty." *Praxis International*, 4:3, 1984; J. Habermas, *The Structural Transformation of The Public Spahere: Opposion and Reform in Poland Since 1968*. Philadelphia: Temple University Press, 1990. untuk Indonesia, Lihat. Arief Budiman, (ed.), *State and Civil Society in Indonesia*, Clayton: Monash University, 1990.

agenda penting dalam wacana dan praktek politik.²² Pada saat yang bersamaan, diketahui bahwa pertumbuhan civil society tak terpisahkan dari kerja dan peran cendekiawan yang karenanya secara historis disebut sebagai salah satu tulang punggungnya.

Dalam hal ini Habermas telah menekankan pentingnya peran kelompok cendekiawan dalam salah satu kajiannya mengenai tumbuh dan berkembangnya civil society di Eropa Barat pada abad ke-18 Dan ke-19.²³ Pengalaman terakhir dalam gerakan pro-demokrasi menentang rezim totaliter di Eropa Timur pun menunjukkan hal yang sama. Apa yang kemudian populer sebagai penemuan kembali dan perberdayaan civil society (*The recovery and Empowerment of civil society*) sebagai langkah terpenting dari proses demokratisasi, hal ini diambil dan diprakarsai oleh kaum cendekiawan seperti Havel, Michnik, dan Patocka dan sebagainya, lewat tulisan-tulisan, karya-karya seni, dan pamflet-pamflet mereka.²⁴

Proses demokratisasi lewat penguatan civil society mendapatkan tempat yang cukup penting dalam wacana politik pasca civil society sendiri dianggap berhasil

²² Secara teoritis, pemahaman yang digunakan oleh Habermas, Ost, Arato, dan Cardoso yang melihat civil society sebagai jaringan, pengelompokan dan asosiasi yang mencakup mulai keluarga, organisasi-organisasi sukarela, sampai pada organisasi yang mungkin dibawah bentukan Negara tetapi berperan sebagai pranata antara Negara dan individu, pribadi dan publik. Dalam pemahaman ini, civil society harus dibedakan dengan suku, klan, dan jaringan klintelisme, karena civil society mengharuskan adanya sifat *publik* dan *civic* yang mempunyai kaitan erat dengan hak untuk kemampuan yang otonom yang secara terbuka berpartisipasi dalam kegiatan umum dan mempertahankan kepentingan-kepentingan mereka (termasuk kepentingan kultural, ekonomi, dan politis) secara publik. Hal ini jelas berbeda dengan pemahaman Hegel dan Marx. Mengenai pandangan dari keduanya lihat, GWF. Hegel, *The Philosophy of Right*. Trans. TM. Knox. London: Oxford University Press, 1967; K Marx, *Critique of Hegel's Philosophy of Right(1834)*. Cambridge University Press, 1967; J. Cohen, *Class and Civil Society: The Limits of Marxian Critical Theory*, Amhers: University of Massachusetts Press, 1983.

²³ J. Habermas, *Structural, Op. cit.* 1989.

²⁴ Misalnya karya-karya Havel mengenai pentingnya penguatan civil society seperti *disturbing the Peace*. New York: Vintage Book, 1991; *Living in Truth: Essays by and about Havel*. London: Faber dan Faber, 1990; *Summer Meditation*. New York: Vintage Book, 1992; *Open Letters: Selected Writing 1965-1990* New York: Vintage, 1991.

diterapkan di Negara-negara Eropa Timur dan bekas Uni-Soviet. Sebagian besar strategi ini banyak dipopulerkan oleh penggunaan term *civil society* sendiri dalam berbagai tulisan, pidato, dan pernyataan politik yang dikemukakan oleh para pemimpin Gerakan pro-demokrasi seperti Vaclav Havel dan Adam Michnik.²⁵

Dalam wacana dan gerakan prodemokrasi di kawasan itu, sistem politik totaliter di bawah rezim komunis disejajarkan dengan kekuatan demokratis yang terdapat dalam masyarakat dengan tujuan memulihkan kemandirian individu sebagai warga Negara (*citizens*), jaminan hak-hak asasi manusia, kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, serta keadilan yang merata, termasuk dalam masalah pembagian sumber daya ekonomi. Sistem politik di bawah rezim totaliter komunis telah dianggap gagal memenuhi janji, baik secara moral maupun institusional, dan oleh karena itu tidak bisa dipertahankan lagi.

Sebagai sebuah konstruk sejarah *civil society* mengalami pemaknaan yang beragam, yang *Pertama* kata *civil society* adalah masyarakat sipil. Konteks sipil dalam hal ini bukan berarti lawan dari militer. *Kedua*, masyarakat madani yang berasal dari bahasa Arab yaitu, kata madaniyah, yang mempunyai makna masyarakat tamaddun, *civil* atau *civilization* yang berarti peradaban. *Ketiga*, masyarakat kewarganegaraan atau warga. Kewarganegaraan merupakan terjemahan dari bahasa Latin dari kata *civilis* atau *civis*. Yang terakhir apa yang dinamakan istilah *civil society* itu sendiri, dalam hal ini istilah atau terjemahan yang ada dirasa tidak cukup memadai.

²⁵ Lihat V. Havel, *Disturbing The Peace*. New York: Vintage Book, 1991; *Open Letters: Selected Writing 1965-1990*. New York: Vintage Book, 1991; *Summer Meditation*. New York: Vintage Book, 1992; "The Power of the powerless." Dalam J. Vladislav, (ed.). *Vaclav Havel or Living in Truth*. London Faber and Faber, 1986. Tentang Michnik, lihat Goldfarb, J. Beyond.

Namun saat ini yang perlu disadari adalah bagi Negara yang tidak demokratis, tantangannya adalah bagaimana Negara itu melakukan proses transisi ke arah demokrasi. Bagi negara yang baru menjadi demokratis tantangannya adalah bagaimana praktek dan lembaga demokratis yang baru itu dapat diperkuat, atau sebagaimana dikemukakan oleh beberapa pakar politik, dikonsolidasikan sehingga dapat bertahan terhadap ujian, waktu, konflik politik dan krisis. Dan bagi Negara demokrasi yang telah lama, tantangannya adalah menyempurnakan dan memperdalam demokrasi itu sendiri.

Dari persoalan diatas, dalam hal ini penulis melihat bahwa ada kecendrungan konflik-konflik yang terjadi di Negara dunia ketiga (di Afrika, di Timur-Tengah, di Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Amerika Latin) berasal dari faktor-faktor kultural, sosial, ekonomi dan politik yang khusus sifatnya, sehingga hanya melalui generalisasi yang sangat umum dapat ditentukan ciri-cirinya yang sama. Hal ini kemudian dapat digolongkan ke dalam 4 kategori²⁶ yaitu: perpecahan bangsa, perkembangan yang timpang, bentrokan kultural, dan gerakan pembebasan.

Penguatan civil society adalah sebuah bagian yang penting dalam semua agenda politik dan teoritis untuk membangun demokrasi. Namun sebelum dapat melaksanakan peran ini, sifat dasar dari civil society, ruang yang dipakainya dalam formasi sosial dan hubungannya dengan Negara perlu diraih terlebih dahulu. Dalam hal ini kemudian gerakan civil society di Nepal tentunya dapat mengkonsolidasikan dirinya dalam menemukan persamaan aktifitas dan geraknya yang lebih transformatif, dengan melihat intensitas politik yang terjadi di Nepal,

²⁶ Lihat, Christoph Bertram *Konflik Dunia Ketiga dan Keamanan Negara*, terj. Drs. A. Hasymi Ali. Jakarta: Bina Aksara, 1988, hal. 48-49.

yang disatu sisi terjadi krisis ekonomi yang salah satunya disebabkan oleh etos kerja yang kurang dan tentunya sangat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi di negeri tersebut.

Adapun alasan yang paling penting adalah civil society harapannya menjadi perisai bagi masyarakat. Termasuk dalam hal ini civil society akan membuat Negara lebih bertanggung jawab (*accountable*), secara demokratis pada rakyatnya dan menggalakkan partisipasi masyarakat seluas mungkin dalam proses governance melainkan (bukan government). Dalam perjalanan sejarahnya Nepal sendiri tidak banyak mengalami persoalan politik yang sangat krusial, tetapi baru tahun 2005 lalu, intensitas politik di Nepal bergejolak menjadi sebuah persoalan yang menarik untuk dikaji, khususnya dalam kajian studi ilmu hubungan internasional.

F. Hipotesa

Menguatnya gerakan civil society sebagai salah satu faktor yang signifikan pengaruhnya dalam transisi demokrasi di Nepal merupakan sebuah bukti bahwa civil society di sana telah mengkonsolidasikan dirinya dalam menemukan proses persamaan gerak politiknya yang lebih transformatif, yang akhirnya mampu menjatuhkan kepemimpinan raja Gyanendra di Nepal yang sebelumnya menjalankan sistem lama yaitu (monarki).

G. Jangkauan Penelitian

1. Unit Analisa

Dalam penelitian ini penulis akan mencoba menjelaskan unit analisisnya yang memfokuskan pada masalah mengenai keterkaitan civil society di dalam proses demokrasi, dari muncul dan terbentuknya hingga menguatnya gerakan civil society di Nepal itu sendiri, melalui proses konsolidasi yang dibangun secara bersama. Yang akhirnya gerakan civil society mampu meruntuhkan kepemimpinan raja Gyanendra sebagai raja Nepal.

2. Waktu Penelitian

Untuk mencegah terlalu luasnya wilayah kajian serta pelebaran masalah maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi yaitu, pada tahun 2005. Pada masa kejatuhan pemerintahan Raja Gyanendra agar pembahasannya lebih fokus.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Adapun jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif eksploratif²⁷

- a. Penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena-fenomena sosial tertentu.

Adapun ciri-ciri metode deskriptif adalah

²⁷ Anwar Syaifudin, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998

- 1) Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang dan permasalahan yang aktual.
 - 2) Yang di kumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan kemudian di analisa.
- b. Penelitian eksploratif yaitu: metode penelitian yang berusaha mencari atau mengungkapkan hal-hal baru yang belum diungkap sebelumnya. Menurut Masri Singarimbun dan Sofian Efendy, ciri-ciri penelitian eksploratif adalah penelitian penjajakan atau bersifat terbuka, masih mencari-cari pengetahuan peneliti tentang masalah yang akan di teliti masih terlalu tipis untuk melakukan studi deskriptif.²⁸
- c. Penelitian deskriptif eksploratif adalah sebuah penelitian yang mendapatkan data awal atau hal baru yang masih samar-samar yang dilakukan seteliti mungkin untuk mendapatkan suatu pembacaan yang komprehensif.

2. Tehnik pengumpulan data

- Metode dokumentasi

yakni dengan menggunakan bahan-bahan referensi yang diperoleh melalui studi pustaka. Adapun data tersebut memiliki sumber sebagai

²⁸ Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis serta akurat dengan fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Lihat: Anwar Syaifudin, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998. hal. 7.

berikut: buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah dan data dari *website*.

I. Sistematika Penulisan

Tulisan ini akan disusun berdasarkan bab per bab. Setiap bab terdiri dari sub-sub bab, agar mempermudah membahas satu persatu masalah yang diteliti. Sehingga muncul sebuah pemahaman yang lebih komprehensif.

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Membahas sejarah perkembangan civil society, yang meliputi:

1. Definisi Civil society dalam berbagai perspektif:
2. Perkembangan civil society di Nepal, dengan fokus pada:
 - a) Munculnya kelompok oposisi yang akhirnya melakukan aksi pembangkangan sosial.
 - b) Munculnya Pembrontakan kaum Maois pada tahun 1996.

Bab III : Membahas mengenai proses terciptanya konsolidasi gerakan civil society, sebagai faktor yang berpengaruh terhadap legitimasi demokrasi di Nepal.

Bab IV : Membahas mengenai partisipasi masyarakat dalam menggalakkan gerakan civil society di Nepal, yang akhirnya mewujudkan Liberalisasi gerakan Perlawanan terhadap pemerintahan Gyanendra. Dengan fokus pembahasan persoalan-persoalan yang terjadi di Nepal yang meliputi:

- a) Penyelenggaraan Pemilu yang diselenggarakan pemerintah di Nepal yang tidak berjalan secara aspiratif, dengan terjadinya

pemboikotan dan penolakan pemilu oleh masyarakat, dan tidak adanya calon yang bersedia dipilih dalam pemilu.

- b) Kepemimpinan raja Gyanendra yang absolut, di tengah terancamnya krisis ekonomi yang menimbulkan aksi demonstrasi besar-besaran oleh masyarakat sipil di Nepal.

Bab V : Penutup

Daftar Pustaka dan Lampiran-Lampiran